

Pemprovsum dan DPRD Sepakati Ranperda Pajak

# Peningkatan Pendapatan Daerah Jadi Fokus Utama

**Peningkatan pendapatan daerah dan percepatan pembangunan Sumatera Utara menjadi fokus utama, setelah Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsum) dan DPRD Sumut meresmikan kesepakatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.**

Medan / Mistar

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Hassanudin, dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.

Ranperda ini menjadi langkah strategis dengan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang terkait dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak.

"Proses pembangunan Sumut akan semakin cepat dengan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Mudah-mudahan segera terealisasi dan dapat kita terapkan," ungkap Pj Gubsu Hassanudin usai penandatanganan, Rabu (29/11/23).

Selain mengenai NPWPD, Ranperda ini juga memperkuat kerja sama Pemprovsum dalam pemanfaatan data dari daerah lain atau pihak ketiga. Tujuannya adalah optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi.

"Saat Perda ini disahkan, kita akan lebih mudah bekerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga, sehingga pemungutan pajak dan retribusi bisa dilakukan secara lebih



PARIPURNA-Pj Gubsu Hassanudin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama antara DPRD Sumut dan Gubsu terhadap Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah di DPRD Sumut Jalan Inam Bonjol Medan, Rabu (29/11/23). (f-ist/mistar)

optimal," terang Hassanudin.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menyatakan, pihaknya telah mengevaluasi dan memberikan masukan untuk Ranperda Pajak dan Retribusi ini. Dia menegaskan, komitmen untuk mempercepat proses peresmian.

"Meskipun mengikuti prosedur, kami berkomitmen agar prosesnya lebih cepat, sehingga dapat diaplikasikan sesegera mungkin," ujar Baskami.

Selain pembahasan mengenai Ranperda Pajak dan Retribusi, Rapat Paripurna juga mencakup tanggapan fraksi terkait Ran-

perda Penyelenggaraan Kepariwisata serta pendapat gubernur terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Kehadiran Sekdaprovsum Arief S Trinugroho dan unsur Forkopimda Sumut turut memperkuat dialog antara eksekutif dan legislatif.

(gunawan/hm10)